

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit dan Opini Audit dalam memberikan pengaruh terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2016 – 2018 dengan total observasi yang diteliti sebesar 78 observasi.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
2. Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
3. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2016 – 2018.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah

provinsi dapat menekan tingkat korupsi. Sementara itu, opini audit tidak dapat membuktikan pengaruh terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pada penelitian ini temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa temuan yang diperoleh oleh BPK dapat menekan tingkat korupsi, sehingga BPK selaku auditor eksternal pemerintah diharap dapat terus melakukan pengawasan atas temuan audit yang berpotensi merugikan keuangan negara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi, artinya setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dapat menekan tingkat korupsi. Pemerintah provinsi diharapkan meningkatkan kesadaran untuk melakukan tindak lanjut atas temuan audit sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah serta menekan potensi kerugian keuangan negara. Selain itu, BPK diharapkan memberikan sanksi kepada pemerintah provinsi yang tidak melakukan tindak lanjut hasil audit.
3. Berdasarkan kesimpulan, bahwa tidak terbuktinya pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi, sehingga untuk pihak yang menindaklanjuti kasus korupsi yang ada pada pemerintah provinsi, seperti Kejaksaan, Polri, dan KPK tidak terkecoh dengan opini WTP yang diperoleh. Opini audit didasarkan pada laporan keuangan yang dibuat instansi pemerintah harus

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan yang harus terbebas dari salah saji material terhadap standar akuntansi.

C. Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran guna penelitian selanjutnya yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang memiliki keterkaitan dengan variabel Tingkat Korupsi, karena dilihat dari hasil koefisien determinasi *Adjusted R-Squared* sebesar 0.124044 atau 12,4%. Selebihnya 87,6% lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan data tahunan, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan data penelitian dengan menggunakan data semesteran.
3. Bagi Pemerintah Provinsi, diharapkan meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Serta diharapkan meningkatkan kesadaran untuk melakukan tindak lanjut atas temuan audit sesuai dengan rekomendasi
4. Bagi BPK RI, BPK selaku auditor eksternal pemerintah diharap dapat terus melakukan pengawasan atas temuan audit yang berpotensi merugikan keuangan negara, serta memberikan sanksi kepada pemerintah provinsi yang tidak melakukan tindak lanjut hasil audit.